



2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALANGKA RAYA**

disdukcapil.palangkaraya.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Reviue atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

LKIP Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran. LKIP mencerminkan tentang pencapaian kinerja, sasaran dan kegiatan serta menjadi bahan evaluasi dan *feed back* bagi seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam rangka melaksanakan kegiatan di masa mendatang. Hasil yang telah diraih berdasarkan dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 menunjukkan kenaikan secara kuantitas baik dari segi keuangan maupun target kinerja, diiringi dengan kenaikan secara kualitas.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pencapaian tersebut sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, peran aktif, dukungan dan kerjasama semua pihak di kalangan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun dengan seluruh unsur pemangku kepentingan.

Kedepan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berusaha untuk terus meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya.

Palangka Raya, Januari 2024



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA**

SABIRIN MUHTAR, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690308 199003 1 007



DAFTAR ISI

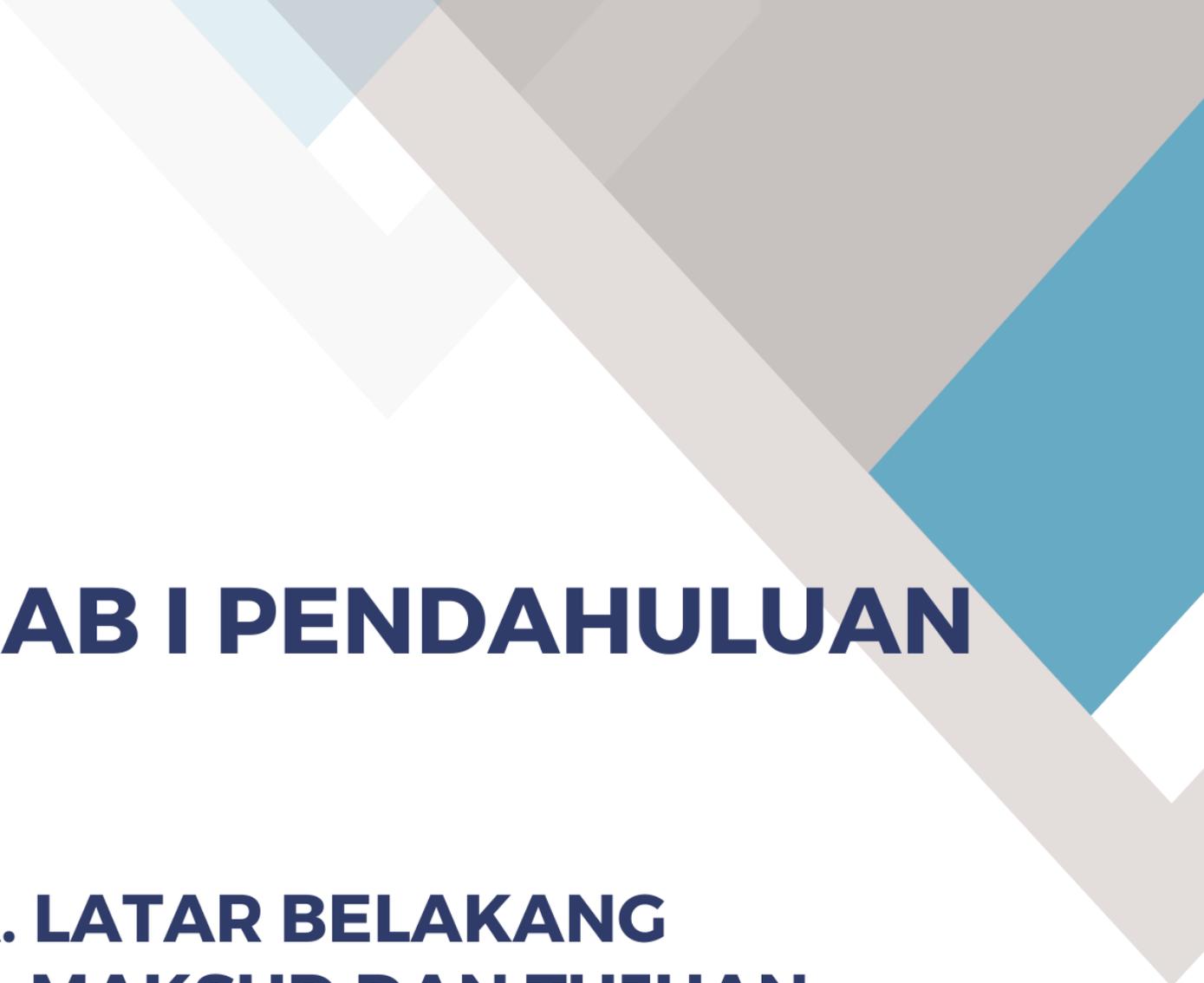
BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG**
- B. MAKSUD DAN TUJUAN**
- C. GAMBARAN UMUM**
- D. ASPEK STRATEGIS**
- E. PERMASALAHAN UTAMA**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance* guna mencapai tujuan serta cita-cita Pemerintah guna mewujudkan Masyarakat Yang Adil dan Makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya selaku penyelenggara pemerintahan berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh SKPD selama Tahun 2023, sebagai konsistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu : **“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Maju,**

Rukun dan Sejahtera untuk Semua” sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Palangka Raya dengan kurun waktu 5 Tahun.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2023 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tahun 2023 dimaksudkan sebagai wujud kewajiban penyelenggara pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran indikator pembangunan yang ditetapkan pemerintah dalam masa satu tahun anggaran.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama tahun 2023. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi terhadap setiap keberhasilan dan/atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan solusinya sehingga capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat kendali untuk mengukur dan mendorong peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

C. GAMBARAN UMUM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. pelaksanaan evaluasi pelayanan pendaftaran dan pelaporan bidang penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pelayanan pendaftaran penduduk, Pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Uraian Tugas adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan dan menyelenggarakan program, kegiatan dan anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. menyelenggarakan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan;
- c. mendisposisikan kegiatan administrasi, organisasi dan Tatalaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan dan agar tercapai hasil yang optimal;

- d. menetapkan dan mengatur Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mendisposisikan surat-surat masuk dan keluar, nota dinas dan nota pertimbangan baik kepada pimpinan tingkat atas maupun pimpinan terbawah sesuai petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan;
- g. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- h. memeriksa, memberi paraf dan atau menetapkan surat keputusan, instruksi, berita acara, laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan kegiatan pada bidang-bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- i. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan tugas yang diberikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/430/2021 Tentang Uraian Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;. Uraian tugas kelompok sub-substansi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya :

I. Sekretariat Dinas.

Sekretariat Dinas mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari:

- (1) Kelompok sub-substansi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan, menyusun draf/ konsep, melaksanakan dan mengawasi kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya.

II. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari:

- (1) Kelompok sub-substansi Identitas Penduduk mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan pengawasan pelayanan penerbitan Seksi Identitas Penduduk;
 - b. menyusun konsep/draft kegiatan pengawasan pelayanan penerbitan Seksi Identitas Penduduk;
 - c. melaksanakan kajian ulang konsep/draft kegiatan pengawasan pelayanan penerbitan Seksi Identitas Penduduk; dan
 - d. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan lingkup Seksi Identitas Penduduk.
- (2) Kelompok sub-substansi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan pengawasan Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - b. menyusun konsep/draft kegiatan pengawasan Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c. membuat telaah staf sebagai bahan kajian kebijakan lingkup Seksi Pindah Datang Kependudukan.
- (3) Kelompok sub-substansi Pendataan Penduduk mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan pengawasan pelayanan penerbitan identitas penduduk;
 - b. menyusun konsep/draft kegiatan pengawasan pendataan penduduk;
 - c. melaksanakan kajian ulang konsep/draf kegiatan pengawasan Seksi Pendataan Penduduk; dan
 - d. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan lingkup Seksi Pendataan Penduduk.

III. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari:

- (1) Kelompok sub-substansi Kelahiran mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran;
 - c. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran;
 - d. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran; dan
 - e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran
- (2) Kelompok sub-substansi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - c. menyusun bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - d. melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - e. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian; dan
 - f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perkawinan dan perceraian.
- (3) Kelompok sub-substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
 - c. menyusun bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan pengangkatan pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
 - d. melaksanakan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;

- e. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan pegangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian; dan
 - f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pegangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian.
- IV. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari :
- (1) Kelompok sub-substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas:
- a. merumuskan perencanaan, menyusun dan *updating* data layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terintegrasi;
 - b. merencanakan, menyusun konsep/draft, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota;
 - c. melaksanakan kajian ulang konsep/draft kegiatan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kota.
 - d. membuat konsep/draft rencana kegiatan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - e. mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan dan mengkaji ulang konsep/draft kegiatan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (2) Kelompok sub-substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas:
- a. merumuskan rencana pengolahan dan penyajian data;
 - b. menyusun *database* kependudukan yang akurat;
 - c. menyusun dokumen pelaporan kependudukan yang akurat;
 - d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen profil kependudukan Kota Palangka Raya;
 - e. merencanakan kegiatan pengawasan pengolahan data kependudukan; dan
 - f. menyusun dan melaksanakan sampai pada pengkajian ulang terkait konsep/draft kegiatan pengawasan pengolahan data kependudukan.
- (3) Kelompok sub-substansi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:

- a. merumuskan pembinaan kapasitas aparatur/sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. merumuskan rencana bimbingan teknis sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. menyusun bahan sosialisasi kepada masyarakat;
- d. melaksanakan penataan hubungan komunikasi dengan media dan masyarakat;
- e. mengelola dan menata sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. menyusun dan melaksanakan sampai pada pengkajian ulang terkait konsep/draft kegiatan penatakelolaan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

V. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari:

(1) Kelompok sub-substansi Kerjasama mempunyai tugas:

- a. melaksanakan konsultasi dan koordinasi didalam penyusunan naskah kerjasama;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas; dan
- c. menghimpun, mengolah dan merencanakan penggunaan dokumen sesuai dengan peruntukannya.

(2) Kelompok sub-substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan bahan, menyusun standar dan prosedur, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b. merencanakan dan melaksanakan kajian ulang sistem pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
- c. menghimpun, mengolah dan merencanakan penggunaan dokumen sesuai dengan peruntukannya.

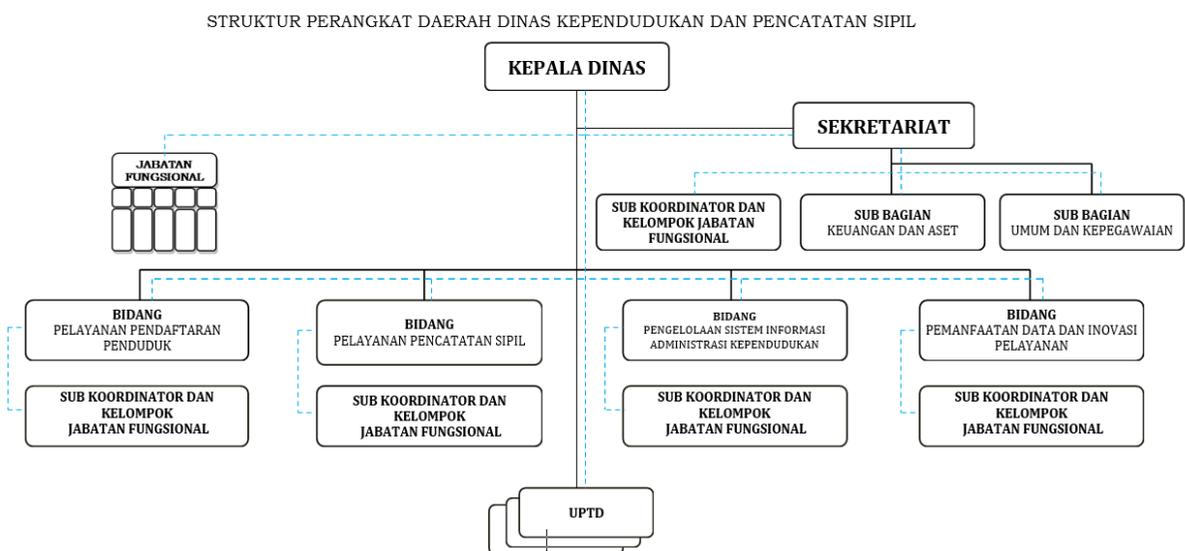
(3) Kelompok sub-substansi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan bahan dan menyusun standar dan prosedur kegiatan Inovasi Pelayanan;
- b. melakukan inovasi pelayanan data untuk layanan kelahiran, kematian, pindah dan datang (LAMPID) serta memberikan umpan balik kepada kecamatan dan kelurahan;

- c. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengembangan sistem aplikasi layanan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- d. menghimpun, mengolah dan merencanakan penggunaan dokumen sesuai dengan peruntukannya.

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagai berikut :



2. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebanyak 80 orang terdiri dari 38 orang yang terdiri dari PNS/PPPK, 42 orang Tenaga Kontrak/PTT. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Disdukcapil Kota Palangka Raya

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1	PNS/PPPK	38	47,50
2	KONTRAK/PTT	42	52,50
	JUMLAH	80	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Kontrak. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai di bawah ini difokuskan hanya pada PNS/PPPK 38 orang.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, pengisian pejabat terdiri dari eselon II, III dan IV selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Disdukcapil yang menduduki
Jabatan dan Staf tahun 2023

No	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1	Eselon II/a	-	0,00
2	Eselon III/a	1	2,60
3	Eselon III/b	4	10,50
4	Eselon IV/a	14	39,50
5	Jabatan Fungsional Umum	19	44,80
	Jumlah	38	100,00

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 38 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya terdapat 26,3 % pegawai yang berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 58 %, golongan II sebanyak 15,7 %, Namun masih ada pegawai yang berstatus golongan I tidak ada. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Disdukcapil Kota Palangka Raya
Pangkat/Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah (orang)	%
1	IV	10	26,70
2	III	26	68,00
3	II	2	5,30
4	I	0	0,00
	Jumlah	38	100,00

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 lebih mendominasi yaitu sebesar 41.66 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTA sebesar 4,16 %. Selengkapnya dapat dilihat pada berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Disdukcapil Kota Palangka Raya
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1	Strata-2 (S2)	12	31,50
2	Strata-1 (S 1)	10	26,40
3	Sarjana Muda/ D3	10	26,40
4	SLTA/SMK	6	15,70
5	SLTP	0	0,00
	Jumlah	38	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan klasifikasi Sarjana Muda, Sarjana dan Magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih baik.

3. Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan tentang gambaran umum Dinas, dengan penekanan kepada organisasi, Aspek Strategis serta permasalahan utama yang sedang di hadapi organisasi.
- BAB II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian ringkasan / iktisar perjanjian kineja tahun yang bersangkutan.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - A. Capaian Kinerja Organisasi, pada bagian ini menyajikan pernyataan kinerja sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran, pada bagian ini menyajikan uraian realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah di gunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV : Penutup, menyampaikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi .

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lain yang dianggap perlu

D. ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai peran dan aspek strategis dalam menjalankan tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.

Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya yang selanjutnya akan memudahkan warga tersebut dalam mengurus keperluan sehari-harinya di berbagai bidang.

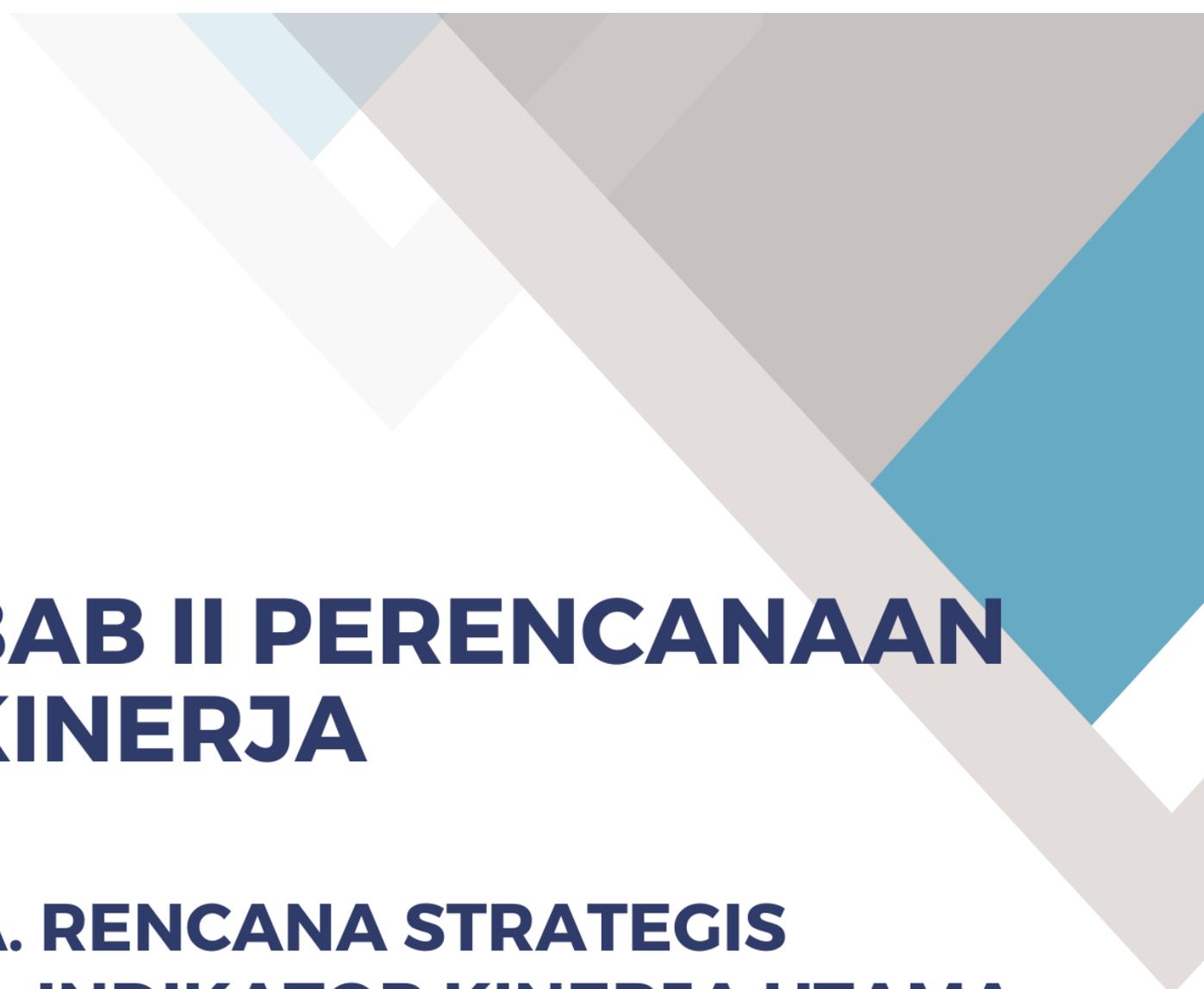
Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Prima kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir timbulnya keresahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan data dan informasi Administrasi Kependudukan yang akurat

Sebagai bukti nyata pelayanan prima kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya terus berinovasi dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, selain melalui pelayanan konvensional atau masyarakat datang langsung ke Dinas Dukcapil, masyarakat juga sudah bisa memanfaatkan layanan secara daring / online melalui website.

E. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya secara berkesinambungan selalu dalam proses pembenahan dan perbaikan namun upaya tersebut masih menyisakan adanya pelayanan yang belum optimal. Permasalahan yang dialami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagai berikut :

- Belum optimalnya Sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan;
- Belum memadainya perangkat Teknologi Informasi dan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Data Arsip pemberkasan Dokumen Adminduk masyarakat belum tertata secara optimal dan belum digitalisasi;



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

D. PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana sudah ditetapkan dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 serta sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 Tahun yaitu dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana Strategis yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Melihat hasil analisis internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya melaksanakan Visi Walikota Palangka Raya yaitu:

***“ Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Maju, Rukun dan Sejahtera
untuk Semua “***

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada waktu yang akan datang.

Adapun Misi Kota Palangka Raya adalah :

- 1) Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (lingkungan cerdas) meliputi Pembangunan Infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
- 2) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *smart society* (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka raya *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas) meliputi Pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.

Sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas dalam hal pelayanan publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya memiliki Misi yang merupakan penjabaran dari Misi ke-2 Walikota Palangka Raya yaitu **“Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *smart society* (masyarakat cerdas)”**

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik”

Adapun rumusan tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien.
2. Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM.
3. Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4. Terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
5. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

4. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN

1. Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 adalah : Meningkatkan Pelayanan Kependudukan.
2. Indikator Sasaran adalah IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun Indikator Kinerja yaitu:

- IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
- Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk
- Rasio Bayi Berakte Kelahiran
- Rasio Pasangan yang berakte Nikah
- Ketersediaan database kependudukan Skala Provinsi / Kabupaten / Kota
- Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
- Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

3. Strategi yang dapat ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu 5 tahun yaitu :

- Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.
- Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial.
- Menciptakan sistem Administrasi Kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat.
- Mengelola Program dan Kegiatan dengan prinsip-prinsip *good governance*

4. Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai diperlukan kebijakan yaitu :

- Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- Pengaturan penyelenggara fungsi manajemen dan aparatur secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	B	B	B	A	A	A

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya di Tahun Anggaran 2023 ini mempunyai sasaran Meningkatnya Pelayanan Kependudukan. Adapun indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun
3. Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian
4. Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya
5. Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL
6. Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga
7. Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata
8. Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder
9. Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik
10. Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Kompeten
11. Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Valid.

Sehingga dapat diturunkan ke dalam target Tujuan Sasaran Jangka Menengah OPD sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Masyarakat yang Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	100	100	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	B	B	A	A
							Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	-	-	-	100	100
								Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian	-	-	-	99	100
								Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	-	-	-	100	100
								Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL	-	-	-	85	100
								Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga	-	-	-	90	100
								Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata	-	-	-	100	100

								Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder	-	-	-	100	100
								Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik	-	-	-	100	100
								Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Kompeten	-	-	-	100	100
								Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Valid	-	-	-	100	100

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan	B	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	8.476.057.642,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Palangka Raya
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	151.311.122,00		
						- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00		
						- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.600.000,00		
						- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.000.000,00		
						- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.100.000,00		
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00								

					-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00
					-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.611.122,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.024.436.947,00
					-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.697.710.663,00
					-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	265.621.034,00
					-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	61.105.250,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		132.212.500,00
					-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	102.212.500,00
					-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.180.494.400,00
					-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.425.500,00
					-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	880.493.900,00

--	--	--

--

-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98.875.000,00
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.950.000,00
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.750.000,00
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		92.747.110,00
-	Pengadaan Meubel	59.200.000,00
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.547.110,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.430.773.063,00
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.740.885,00
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.278.178,00
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.220.754.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		464.082.500,00

					- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.991.700,00
					- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.441.800,00
					- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00
					- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000,00
					- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.649.000,00
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	245.682.200,00
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk	214.077.800,00
					- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	93.985.900,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan	B	A
				Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL	50%	100%
				Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga	60%	100%
				Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata.	100%	100%

					- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumenatas Pendaftaran Penduduk	100.091.900,00
					- Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	20.000.000,00
					Penataan Pendaftaran Penduduk	31.604.400,00
					- Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	31.604.400,00
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan	B	A			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	130.000.100,00
Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	40%	100%			Pelayanan Pencatatan Sipil	130.000.100,00
Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian	100%	100%			- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumenatas Pelaporan Peristiwa Penting	60.000.000,00
Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting	40%	100%			- Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	70.000.100,00
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan	B	A			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	199.900.313,00
Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder	100%	100%			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatandan Penyajian Database Kependudukan	135.000.000,00

			Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik	100%	100%	-	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	100.000.000,00
			Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Kompeten	100%	100%	-	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	35.000.000,00
							Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	64.900.313,00
						-	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	14.918.750,00
						-	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	49.981.563,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan	B	A		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	168.135.650,00
			Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Valid	100%	100%		Penyusunan Profil kependudukan	168.135.650,00
						-	Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota	56.993.775,00
						-	penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	111.141.875,00

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang akan dicapai. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya dan terencana sedemikian rupa sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka memberikan arahan dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai dasar acuan pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Visi, Misi serta sasaran strategis Pemerintah Kota Palangka Raya

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Triwulan II Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang kemudian dijabarkan dalam tugas dan fungsi yang ada terdiri dari 5 program 13 kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Adapun ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Palangka Raya Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
2.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%

No.	Program	Anggaran	<u>Keterangan</u>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 8.913.500.742	
2.	Program <u>Pendaftaran Penduduk</u>	Rp. 295.242.200	
3.	Program <u>Pencatatan Sipil</u>	Rp. 125.000.100	
4.	Program <u>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</u>	Rp. 271.897.213	
5.	Program <u>Pengelolaan Profil Kependudukan</u>	Rp. 164.135.650	
	<u>Total Anggaran</u>	Rp. 9.769.775.905	

Sedangkan di level Kementerian Perjanjian Kinerja Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Plt Kepala Dinas



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 860-2627 Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas Dan Sekretaris Dinas Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. EDIE**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **ZUDAN ARIF FAKRULLOH**
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahun 2023 sesuai dengan perjanjian ini, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. **Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA**, yaitu :

NO. (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kota Palangka Raya	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi: a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra e. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data f. Integrasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD g. Buku Pokok Pemakaman (BPP) h. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) i. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan	99,4 % 98 % 50 % 3 (tiga) Mitra 15 (lima belas) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia 15 (lima belas) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia o 75 % desa/kelurahan/ nama lain memiliki BPP o 75 % pemakaman umum /pemakaman keluarga yang ada petugasnya memiliki BPP 25 % dari Total Perekaman di daerah Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT

NO. (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
		j. Kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021 k. Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk	Tidak ada Pelanggaran Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan adminduk
2.	Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran/Output hasil Pelayanan Dokumen Lainnya	Output 24 (dua puluh empat) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat
3.	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafdud, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Tiap Semester 1 (satu) inovasi (1 tahun 2 inovasi)
4.	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah	Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan: 1. Ketersediaan Blangko KTP-el 2. Aset BMN di daerah (Peralatan KTP-el)
5.	Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Tersusunnya profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota
6.	Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan	Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat desa	Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa
7.	Penerapan Zona Integritas (ZI)	Dilakukan penancangan Zona Integritas (ZI)	Tersusunnya Tim Pembangunan Zona Integritas dan laporan pelaksanaan Zona Integritas Pada Dinas Dukcapil Kota Palangka Raya

PIHAK KEDUA akan melakukan pembinaan, monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja atas Perjanjian Kinerja ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Anif Fainuloh



Jakarta, 8 Februari 2023

PIHAK PERTAMA

Pit. Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Palangka Raya

H.EDIE

Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah dibandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

Sedangkan target Kinerja dan Anggaran dari masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sasaran Indikator Target Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	
				5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	5.679.219.946	100,00	-	100	8.913.500.742
			Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti (Temuan)	0,00		0,00		0	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	0,00		0,00		0	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dicetak (Dokumen)	0,00	155.581.750	0,00	-	8	149.828.350
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	35.680.000	0,00	-	2	45.290.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	79.901.750	0,00	-	1	8.600.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	11.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	8.100.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	10.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	40.000.000	0,00	-	12	43.227.228
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	0,00	-	0,00	-	2	23.611.122

			Perangkat Daerah (Laporan)						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	4.765.149.923	0,00	-	7	5.038.186.947
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	4.590.857.639	0,00	-	39	4.697.710.663
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	155.172.284	0,00	-	12	279.371.034
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	19.120.000	0,00	-	12	61.105.250
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pegawai yang Terpenuhi (Orang)	0,00	83.750.000	0,00	-	90	132.212.500
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	53.750.000	0,00	-	90	102.212.500
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	30.000.000	0,00	-	6	30.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rutin Kantor yang Terpenuhi (Bulan)	0,00	208.573.088	0,00	-	12	1.541.349.500
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	14.425.500
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	13.835.000	0,00	-	12	1.205.699.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	5.624.688	0,00	-	2	98.875.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	28.995.400	0,00	-	12	30.950.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	6.250.000	0,00	-	12	31.400.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	153.868.000	0,00	-	12	160.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	205.047.110
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	59.200.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	145.847.110
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	0,00	235.017.885	0,00	-	12	1.408.795.835

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	221.199.760	0,00	-	12	192.740.885
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	17.278.178
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	13.818.125	0,00	-	12	1.198.776.772
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	0,00	231.147.300	0,00	-	12	438.080.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	77.598.300	0,00	-	14	78.991.700
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	32.132.250	0,00	-	2	25.441.800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	28.440.000	0,00	-	12	45.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	68.146.750	0,00	-	1	190.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	24.830.000	0,00	-	2	98.647.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (%)	100,00		100,00		100	295.242.200
		Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata (%)	100,00	320.000.000	100,00	-	100	
		Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL (%)	100,00		100,00		100	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Layanan)	0,00	170.000.000	0,00	-	20	224.077.800
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	*Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	500	93.985.900
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	0,00	150.000.000	0,00	-	500	110.091.900

	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	0,00	20.000.000	0,00	-	120	20.000.000
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	0,00	150.000.000	0,00	-	21	31.604.400
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	*Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	0,00	150.000.000	0,00	-	1	31.604.400
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			-		-		39.560.000
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	39.560.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting (%)	100,00		100,00		100	125.000.100
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun (%)	100,00	38.119.688	99,43	-	100	
		Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian (%)	100,00		100,00		100	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil (Layanan)	0,00	38.119.688	0,00	-	28	125.000.100
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	0,00	38.119.688	0,00	-	500	60.000.000
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	0,00	-	0,00	-	28	65.000.100
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder (%)	100,00		100,00		100	271.897.213
		Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik (%)	100,00	1.178.084.313	100,00	-	100	
		Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai (%)	100,00		100,00		100	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (Dokumen)	0,00	1.123.184.000	0,00	-	2	135.000.000
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	0,00	1.073.184.000	0,00	-	2	100.000.000
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0,00	50.000.000	0,00	-	6	35.000.000

		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dokumen)	0,00	54.900.313	0,00	-	12	136.897.213
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0,00	4.918.750	0,00	-	12	93.415.650
		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	*Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	0,00	49.981.563	0,00	-	12	43.481.563
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Memadai (%)	100,00	138.135.875	100,00	-	100	164.135.650
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun (Dokumen)	0,00	138.135.875	0,00	-	2	164.135.650
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	64.345.625	0,00	-	2	52.993.775
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	*Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain (Dokumen)	0,00	73.790.250	0,00	-	1	111.141.875
									9.769.775.905



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- B. REALISASI ANGGARAN**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pendoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian indikator kinerja digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1.

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Deskripsi Indikator
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Indek Kepuasan Masyarakat	<p>→ Survei ini adalah mengukur kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan media survey menggunakan web site si DOI : https://sidoidukcapil.palangkaraya.go.id/</p> <p>→ Unsur Pelayanan pada setiap jenis pelayanan :</p> <p>→ Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru/Perubahan</p> <p>→ Perekaman KTP-el</p> <p>→ Penerbitan KTP-el</p> <p>→ Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)</p> <p>→ Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)</p> <p>→ Legalisir Fotocopy KK/KTP</p> <p>→ Pelayanan Pencatatan Kelahiran</p> <p>→ Pelayanan Pencatatan Kematian</p> <p>→ Pelayanan Pencatatan Perkawinan</p> <p>→ Pelayanan Pencatatan Perceraian</p> <p>→ Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama</p> <p>→ Pelayanan Legalisir Akta</p> <p>→ Nilai IKM dihitung menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\text{IKM} = \frac{\text{Total Rata-Rata dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Bobot Nilai Rata-Rata Terimbang}$ </div>
No	Sasaran Program	Indikator	Deskripsi Indikator
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	→ Jumlah Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran dibanding jumlah penduduk 0-18 tahun.
		Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian	→ Jumlah kepemilikan Akta Kematian dibanding jumlah penduduk yang melaporkan peristiwa kematian
		Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	→ Jumlah kepemilikan dokumen peristiwa penting lainnya dibanding jumlah penduduk yang melaporkan peristiwa penting lainnya
		Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL	→ Jumlah kepemilikan KPTel dibanding jumlah penduduk yang wajib KPTel
		Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga	→ Jumlah kepemilikan KK dibanding jumlah Kepala Keluarga
		Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata	→ Jumlah penduduk dokumen pindah datang dan keluar yang dilaporkan dibanding dengan jumlah dokumen pindah datang keluar yang diterbitkan
		Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder	→ Jumlah Permintaan Database yang dipenuhi dibagi dengan jumlah seluruh permintaan database
		Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik	→ Jumlah jaringan SIAK dalam kondisi baik dibagi dengan Jumlah Jaringan SIAK
		Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Kompeten	→ Jumlah SDM SIAK tersedia dibagi dengan Jumlah SDM SIAK tersertifikasi

		Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Valid	→ Jumlah Laporan dan penyajian data dokumen profil kependudukan setiap semester
--	--	--	---

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

a. Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Startegis : Meningkatkan Pelayanan Kependudukan

Indikator Kinerja Utama	Target	Tahun 2023 Realisasi	Capaian
IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	A	A	100 %

Capaian Kinerja Tahun 2023							
No.	Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas	Meningkatnya Pelayanan Kependudukan	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	A	A	100 %	Baik
Perhitungan Indikator Kinerja							
$IKM = \frac{\text{Total Rata-Rata dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Bobot Nilai Rata-Rata Terimbang}$					89,68	A	

Berdasarkan Tabel di atas Analisis Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tahun 2023 ditargetkan Mutu Pelayanan A dengan rentang indeks 88,31-100. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya melakukan Survei IKM tahun 2023 terhadap 12 jenis layanan didapat bahwa IKM dengan indeks sebesar 89,68 atau kategori (A).

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM	KRITERIA
A.	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK		
1	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU/PERUBAHAN	92,80	Baik
2	PEREKAMAN KTP-EL	90,91	Baik
3	PENERBITAN KTP-EL	92,19	Baik
4	PENERBITAN KIA	90,13	Baik

5	PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH (SKPWNI)	89,47	Baik
6	LEGALISIR FOTOCOPY KK/KTP	89,36	Baik
	RATA-RATA	90,81	Baik
B.	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL		
7	PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN	88,63	Baik
8	PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN	88,25	Baik
9	PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN	88,86	Baik
10	PELAYANAN PENCATATAN PERCERAIAN	88,58	Baik
11	PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA	88,08	Baik
12	LEGALISIR AKTA	88,91	Baik
	RATA-RATA	88,55	Baik
	PELAYANAN KESELURUHAN RATA-RATA	89,68	Baik

Dari tabel di atas, berdasarkan penilaian IKM terhadap 12 jenis pelayanan yang disurvei, semua unsur pelayanan mendapatkan nilai kenaikan dari semua pelayanan pada Disdukcapil Kota Palangka Raya, walaupun kenaikan tersebut tidak banyak mulai dari nilai 88,08 (Baik) hingga nilai tertinggi 92,80 (Baik), maka jika dikonversikan dengan pedoman interval IKM maka keseluruhan jenis pelayanan yang disurvei seluruhnya (Baik) di harapkan pada tahun-tahun berikutnya menjadi Sangat Baik. Berarti Kinerja harus lebih di tingkatkan lagi.

Bila dirata-ratakan berdasarkan jenis bidang pelayanannya, pelayanan pendaftaran penduduk rata-rata nilainya 90,81 (Baik), dan pelayanan pencatatan sipil rata-rata nilainya adalah 88,55 (Baik). Pada Semester II Tahun 2023 ini nilai rata-rata IKM pada 12 jenis pelayanan yang di survei berkategori A yang berarti Kinerja Baik dengan nilai 89,68. Bila di bandingkan dengan Semester I Tahun 2023 (yaitu nilai 88,73) ada kenaikan nilai IKM.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2023 atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palangka Raya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mutu pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Semester II Tahun 2023 secara keseluruhan (12 jenis pelayanan yang disurvei) mengalami peningkatan nilai, kategori tetap A (Sangat Baik) dan dengan nilai rata-rata 89.68 yang bila dibandingkan dengan nilai rata-rata IKM Semester I tahun 2023 (88.73), terjadi sedikit peningkatan sebesar 1,07 %.
- 2) Bila dilihat per jenis bidang pelayanan, pelayanan di Bidang Pendaftaran Penduduk sedikit meningkat sebesar 1,09 % di mana pada semester I

tahun 2023 nilai rata-rata IKM sebesar 89,83, Pada semester II tahun 2023 ini ada kenaikan menjadi 90,81 (Sangat Baik). Begitu juga pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengalami kenaikan sebesar 1,06%, di mana pada Semester I tahun 2023 nilai rata-rata IKM sebesar 87,63 (Baik) naik menjadi 88,55 % (Sangat Baik)

- 3) Bila dilihat per jenis pelayanan, kenaikan jenis pelayanan tertinggi terjadi pada jenis pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Baru/Perubahan , yaitu naik sebesar 4.37%. Dan semua pelayanan tidak ada penurunan nilai walau pun kenaikan rata-rata tidak begitu banyak.
- 4) Bila dilihat per jenis unsur pelayanan, secara umum persepsi masyarakat rata-rata menganggap unsur Kesesuaian Produk Pelayanan (U5) dan (U7) Perilaku Petugas sudah sangat baik, hal ini dapat di lihat pada unsur penilaian yang selalu mendapat nilai tinggi kemudian unsur pelayanan berikutnya yang diapresiasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Disdukcapil Kota Palangka Raya Semester II Tahun 2023 dengan cukup baik juga adalah U1 (kesesuaian persyaratan) , U3 (kecepatan penyelesaian) dan U4 (Kesesuaian Sistem Informasi Pelayanan Publik
- 5) Pada semester II tahun 2023 secara umum persepsi masyarakat rata-rata menganggap unsur U6 (Kemampuan /Kompetensi petugas) adalah paling rendah dilanjutkan dengan unsur U9 (Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan), menjadi suatu perhatian untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkompeten dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat, mengingat tugas pokok kantor Dukcapil Palangka Raya adalah Pelayanan Publik.
- 6) Hasil survei kepuasan masyarakat Semester II Tahun 2023 menunjukkan hasil yang Sangat Baik, yaitu terjadinya peningkatan nilai pada semua jenis layanan termasuk pada Pelayanan Pencatatan kelahiran yang pada semester I Tahun 2023 kemaren merupakan hasil survei terendah, namun di semester II 2023 ada kenaikan sebesar 3,10%. Angka ini, walaupun tidak banyak namun menggambarkan adanya upaya perbaikan yang serius dari Disdukcapil Kota Palangka Raya untuk terus berupaya memperbaiki pelayanannya dari waktu ke waktu.
- 7) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya (menurut persepsi masyarakat) masuk dalam kategori Sangat Baik yang menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna layanan sudah merasa cukup puas dengan penyelenggaraan pelayanan yang selama ini dijalankan. Sejak ada

aplikasi online SI DOI (Sistem Informasi Dukcapil Olah Itah) Disdukcapil Kota Palangka Raya, masyarakat merasa terbantu untuk pengurusan dokumen Adminstrasi Kependudukan mereka, walaupun mereka dari jarak jauh bisa mengurus dokumen melalui Aplikasi SI DOI Dukcapil Kota Palangka Raya. Hasil ini tentu saja perkembangan yang menggembirakan dan tidak juga membuat merasa gembira berlebihan karena ini masih jauh dari yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan yang lebih inovatif dan serius untuk mendapat nilai Sangat Baik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Disdukcapil Kota Palangka Raya Semester II Tahun 2023.

- 8) Survei dilaksanakan pada semester II Tahun 2023, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dilakukan melalui pengisian Survei kepuasan masyarakat yaitu dengan kuisisioner online melalui Google form yang disebarakan kepada responden melalui Pelayanan Online di Website <https://sidoidisdukcapil.palangkaraya.go.id>. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

b. Kinerja Program

Capaian Kinerja Tahun 2023						
No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL	99,40%	99,44%	100,04%	Sangat Tinggi
Perhitungan Indikator Kinerja						
$\frac{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP el Yang Telah Melakukan Perekaman}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP el}} \times 100\%$					$\frac{207.570}{208.833} \times 100\%$	100,04%

Tahun 2023 jumlah penduduk Kota Palangka Raya sebanyak 306.104 dengan Wajib KTP-El sebanyak 214.903 yang sudah melakukan perekaman mencapai 213.695 (99,44%) atau telah mencapai target sebesar 100,04% dari target yang ditetapkan sebesar 99,40%. Namun demikian masih terdapat kendala untuk mencapai perekaman secara maksimal karena masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman dan menganggap bahwa KTP eletronik penting saat dibutuhkan. Melihat kondisi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang KTP-el serta pentingnya dokumen kependudukan, serta melakukan jemput bola dengan inovasi kegiatan Dukcapil Maja Masyarakat (DMM), mendatangi langsung ke

Kelurahan dan Kecamatan untuk melakukan perekaman KTP-el, serta melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah khususnya SMA di Kota Palangka Raya untuk melakukan perekaman bagi siswa yang sudah berusia 17 tahun + 1 hari.



Dalam rangka percepatan perekaman KTP elektronik atau e-KTP bagi seluruh masyarakat Kota Palangka Raya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya melakukan aksi jemput bola ke beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kota Palangka Raya. Yang menjadi sasaran kegiatan adalah anak SMA yang berusia 17 tahun atau lebih, dengan berkoordinasi langsung dengan pihak sekolah sehingga siswa dapat langsung mendatangi tempat perekaman. Kegiatan ini di laksanakan pada hari sabtu dan minggu, bertempat di ruang perekaman data Disdukcapil Kota Palangka Raya dan sasaran untuk hari ini adalah siswa dari SMAN 3 Palangka Raya dibatasi berjumlah 46 orang. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu proses belajar para siswa di sekolah. Siswa hanya membawa syarat yang perlu disiapkan agar mendapatkan pelayanan yakni membawa kartu keluarga (KK) sebagai bukti jati diri sudah terdaftar di keluarganya namun belum memiliki KTP elektronik.

Capaian Kinerja Tahun 2023						
No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Perhitungan Indikator Kinerja						
$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$					$\frac{97.264 \times 100\%}{97.264}$	100%

Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. KK wajib dimiliki oleh setiap keluarga.

Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II mencatat sebanyak 97.264 Kepala Keluarga dengan rincian sebanyak 97.264 adalah kepala Keluarga berjenis Kelamin Laki-laki sebanyak 79.598 dan sebanyak 17.666 adalah Kepala Keluarga Berjenis Kelamin Perempuan.



Untuk percepatan warga dalam memperoleh Kartu Keluarga Dukcapil Kota Palangka Raya melakukan Jemput bola ke rumah-rumah warga terutama bagi penduduk rentan, Lansia dan orang sakit, selain itu Kartu Keluarga juga dapat dilayani secara online melalui aplikasi pelayanan online SIDOI.

Capaian Kinerja Tahun 2023						
No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Perhitungan Indikator Kinerja						
Jumlah penduduk dokumen pindah datang dan keluar yang dilaporkan					692 x 100%	100%
Jumlah penduduk dokumen pindah datang dan keluar yang terdata					692	

Jumlah penduduk pindah dan datang dari dan ke Kota Palangka Raya berdasarkan Kartu Keluarga sebanyak 692 Kepala Keluarga. Permohonan pindah datang juga dapat dilakukan melalui aplikasi si DOI dengan tanpa perlu datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk menerbitkan SKPWNI warga.

Capaian Kinerja Tahun 2023						
No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	98%	99,75%	101,7%	Sangat Tinggi
Perhitungan Indikator Kinerja						
Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Lahir					93.942 x 100%	99,75%
Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun					94.171	

Rasio jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran pada tahun 2023 menurut umur 0 – 18 Tahun. Sampai dengan tahun 2023, di Kota Palangka Raya jumlah anak yang berumur 0-18 tahun berjumlah 94.171 orang. Dari jumlah tersebut yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 93.942 orang dan yang belum memiliki Akta Kelahiran 229 orang, artinya melebihi target, meski demikian untuk mencapai 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya masih menyisakan 0,35% atau 229 orang yang belum memiliki Akta Kelahiran.

Capaian Kinerja Tahun 2023						
No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Perhitungan Indikator Kinerja						
Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan					8.781	100%
Peristiwa Kematian yang Dilaporkan					8.781 x 100%	

Dalam rangka peningkatan cakupan Akta Kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah menerapkan Pelaporan Kematian di kelurahan. Penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian tersebut, dimaksud agar setiap kematian penduduk dapat dilaporkan untuk diterbitkan akta kematiannya dan meningkatkan akurasi basis data kependudukan.



Untuk pendataan lebih lanjut juga dilakukan kegiatan Jemput Bola inovasi Jelata ke rumah-rumah duka untuk diserahkan secara langsung Akta Kematian ke pihak keluarga yang berduka.

Capaian Kinerja Tahun 2023						
No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya (Perkawinan)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya (Perceraian)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Perhitungan Indikator Kinerja						
Jumlah kepemilikan dokumen peristiwa penting lainnya (perkawinan) $\frac{\text{Jumlah kepemilikan dokumen peristiwa penting lainnya (perkawinan)}}{\text{Jumlah peristiwa penting lainnya yang dilaporkan}} \times 100\%$					$\frac{88.349}{88.349} \times 100\%$	100%
Jumlah kepemilikan dokumen peristiwa penting lainnya (perceraian) $\frac{\text{Jumlah kepemilikan dokumen peristiwa penting lainnya (perceraian)}}{\text{Jumlah peristiwa penting lainnya yang dilaporkan}} \times 100\%$					$\frac{5.155}{5.155} \times 100\%$	100%

Target Tahun 2023 sebesar 100% perkawinan yang dilaporkan terealisasi sebesar 5.155 atau terealisasi sebesar 100%.

Capaian Kinerja Tahun 2023						
No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder	15	9	66%	Sangat Tinggi
Perhitungan Indikator Kinerja						
Jumlah Kerjasama _____ x 100%					$\frac{9}{15} \times 100\%$	66%
Jumlah Stakeholder yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan PK						



Kerjasama pemanfaatan data dilakukan dengan berbagai stakeholder dalam rangka akses dan pemanfaatan data Adminduk. Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan Ditjen Dukcapil kementerian Dalam Negeri RI ditargetkan sebanyak 15 OPD Kerjasama pemanfaatan Data. Sampai dengan 31 Desember 2021 telah dilaksanakan sebanyak 9 OPD yang melakukan kerjasama. Keterbatasan ini, diakibatkan karena untuk melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan mewajibkan lulus ISO 27001.

Berikut Daftar kerjasama dengan stakeholder :

No	OPD	Tentang/ Perihal	Nomor	Tanggal
1	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kota Palangka Raya	470/406/DKPS/IX/2019 711/Sekrt-01/SOS/IX/2019	24-Sep-19
	<i>Adendum</i>	<i>Adendum Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kota Palangka Raya</i>	<i>470/553/DKPS/XI/2023</i>	<i>08-Nov-23</i>
2	Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Pemanfaatan Nomor Unduk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	470/407/DKPS/IX/2019 440/388/A-1/Sekrt/IX/2019	24-Sep-19
	<i>Adendum</i>	<i>Adendum Pemanfaatan Nomor Unduk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya</i>	<i>470/368/DKPS/XI/2023</i>	<i>08-Nov-23</i>
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya	Kerjasama Dalam Bidang Pelayanan Akta Kelahiran, Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak Bagi Bayi yang Lahir dan Akta Kematian Bagi Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya	024/231/DKPS/V/2022 444/017/B-12/RSUD/V/2022	20 Mei 2022
4	Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya	Kerjasama Dalam Bidang Pelayanan Akta Kelahiran, Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak Bagi Bayi yang Lahir dan Akta Kematian Bagi Masyarakat di Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya	024/230/DKPS/V/2022 B/7/III/HUK.8.1.1./2022/RUMKIT	19 Mei 2022

5	Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya	Kerjasama Dalam Rangka Pelayanan Publik berupa Kegiatan atau Rangkaian Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	471.31/338/DKPS/X/2020 2817/Kk.15.5.6/HM.01/10/2020	20 Oktober 2020
6	Pengadilan Negeri Palangka Raya	Pemberlakuan Aplikasi SIAP PADUKA	W16-U1/307/HK.00/X/2021 470/567/PDIP-DKPS/XI/2021	24-Nov-21
7	Pengadilan Agama Palangka Raya	Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Dalam Lingkup Tugas Pengadilan Agama Palangka Raya	470/039/DKPS/II/2021 W16-A1/259/HM.01.1/II/2021	04 Februari 2021
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Pemanfaatan Nomor Unduk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	470/408/DKPS/IX/2019 476/DKISP/IX/2019	24-Sep-19
	<i>Adendum</i>	<i>Adendum Pemanfaatan Nomor Unduk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya</i>	<i>470/551/DKPS/XI/2023</i>	<i>08-Nov-23</i>
9	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus	Pelayanan Pembuatan dan Distribusi Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kematian	7033/KH-HK/RSUD/10-2019 9/PKS-KSD/PLK/2019	08 Oktober 2019
10	Kantor Pos Palangka Raya	Kerjasama Pengiriman Dokumen Kependudukan Melalui Kantor Pos	14/KB-KSD/PLK/2019 1415/PENJUALAN IX/6/2019	27-Sep-19
11	Rumah Sakit Awal Bros Betang Pabelum	Kerjasama Dalam Bidang Pelayanan Akta Kelahiran, Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak Bagi Bayi yang Lahir dan Akta Kematian Bagi Masyarakat di Rumah Sakit Awal Bros Betang Pabelum Palangka Raya	024/1005/DKPS/XI/2018 024/PKS/MKT/XI/2018	06-Nov-18

12	Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	5/PKS-KSD/PLK/2021 PERJ.64/BSSN/BS/KH.02 .01/07/2021	15 Juli 2021
13	RA Perwanida 1 Palangka Raya	Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Kota Palangka Raya	21.06/4/RA.PWD- /DWP.Kemenag/91/IX/2019	30-Nov-21
14	TK Al Furqan Palangka Raya	Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Kota Palangka Raya	470/526/DKPS/XI/2022 03/MI-TK AL FRQ/PKY/XI/2022	17-Nov-22
15	RA Al Azhar Palangka Raya	Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Kota Palangka Raya	470/667/DKPS/XI/2021 71/RA.AIAzhr/PKY/2021	30-Nov-21
16	Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang	Pengembangan Pendidikan Dalam Lingkup Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	895,4/122/DKPS/III/2021 B-90/DK.FDS/PP.09/03/2021	01-Apr-21
17	Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya	Pensertifikatan Tanah, Penangan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah	8/PKS-KSD/PLK/2019 755/100.2/62.21/X/2019	12-Sep-19
18	PT Taspen Kantor Cabang Palangka Raya	Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	12/PKS-KSD/PLK/2019 JAN-11/C.1.4/JKK-JKM/122019	29-Nov-19
		Adendum Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	8/PKS-KSD/PLK/2021 JAN-003A/C.1.4/122021	15-Nov-21
19	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palangka Raya	Kesepakatan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kontrak atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020	16/PKS-KSD/PLK/2020 PER/35/112020	18-Nov-20

20	BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya	Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya	9/PKS-KSD/PLK/2021 217/KTR/VIII-06/1221	24 Desember 2021
		Adendum Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya	7/PKS-KSD/PLK/2021 121/KTR/VIII-06/1221	29-Nov-21
21	Toko Fikri Palangka Raya	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya	470/450/DKPS/XI/2020	23-Nov-20
22	Toko Figura Bahtiar	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya	470/450/DKPS/XI/2020	23-Nov-20
23	Penjahit Indra Jaya Palangka Raya	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya	470/450/DKPS/XI/2020	23-Nov-20
24	Toko Logos Komputer Palangka Raya	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya	470/450/DKPS/XI/2020	23-Nov-20
25	EIGER Store Palangka Raya	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya	470/450/DKPS/XI/2020	23-Nov-20
26	RA Annisa 2 Palangka Raya	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya	474/69/DKPS/I/2023 010/RA.ANNISA 2 /I/2023	01 Februari 2023
27	RA Nurul Hikmah Palangka Raya	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya	474/68/DKPS/I/2023 21.06/RA.NH/04/I/2023	01 Februari 2023
28	RA Al-Muslimun Palangka Raya	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya	474/67/DKPS/I/2023 90/RA.ALM.INI-15.52/PP.004/I/2023	01 Februari 2023
29	PAUD Tiara P.Raya	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya	420/28/I.421/Tk-Tiara/Kec.Jkr/IX/2023	26/09/2023
30	TK AL IMAN P.Raya	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya	420/515/I.421/Tk-IMN/Kec.phdt/XI/2023	26/09/2023
31	TK EKKLESIA PUTRA PUTRI P.Raya	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya	420/030/I.421/JKN/TK-EKPPM/IX/2023	26/09/2023

32	TK AR RAHMAN AR RAHIM P.Raya	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya	420/02- MOU/I.421/JKN/TK- ARR/PLK/IX/2023	26/09/2023
33	MI Ibtibidayah Hidayatul Insan P.Raya	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya	97/YSS-HIF/I.421/JKN/MI- HI/IX/2023	26/09/2023
34	TK Adhyaksa XVIII P.Raya	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya	420/282/I.421/TK- ADY/Kec.Jkr/XII/2023	06/12/2023
35	RA Hidayah Insan P.Raya	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya	98/YSS-HIF/I.421/SK.RA- HIF/VI/2023	18/04/2023
36	Dinas Penanaman Modal Kota P. Raya	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya	470/569/DKPS/X/2023	18 Oktober 2023
37	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustria n Kota Palangka Raya	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya	470/568/DKPS/X/2023	18 Oktober 2023
38	Dinas Pengendali an Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberday aan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberday aan Masyarakat Kota Palangkja raya	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangkja raya	470/570/DKPS/X/2023	18 Oktober 2023
39	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya	470/566/DKPS/X/2023	18 Oktober 2023

40	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	470/565/DKPS/X/2023	18 Oktober 2023
41	Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	470/567/DKPS/X/2023	18 Oktober 2023

Capaian Kinerja Tahun 2023						
No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Perhitungan Indikator Kinerja						
Jumlah Jaringan SIAK Dalam Kondisi Baik					$\frac{1}{1} \times 100\%$	100%
Jumlah Jaringan SIAK						

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. SIAK melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan peristiwa kependudukan (population events) dan peristiwa penting (vital events) yang dialami oleh penduduk sejak lahir hingga meninggal dunia. Data kependudukan yang tersimpan dalam basis data yang keluarannya antara lain: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, dan sebagainya.

Capaian Kinerja Tahun 2023						
No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Kompeten	100%	100%	200%	Sangat Tinggi
Perhitungan Indikator Kinerja						
Jumlah SDM SIAK Tersedia					$\frac{2}{1} \times 100\%$	200%
Jumlah SDM SIAK Tersertifikasi						

SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan dalam menyelenggarakan layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pedoman utama penerapan SIAK diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, SIAK juga diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini mempunyai 2 orang ASN sebagai Administrator Database (ADB) untuk menangani Administrasi Database SIAK.

Capaian Kinerja Tahun 2023						
No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Valid	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Perhitungan Indikator Kinerja						
Jumlah Penyajian Data Dokumen Profil dalam setahun 2 kali setahun					$\frac{2}{2} \times 100\%$	100%

Capaian Kinerja setiap sasaran dituangkan dalam masing-masing indikator dan disusun dengan menetapkan target tahun berjalan. Pada semester II dilakukan evaluasi atas target kinerja yang ditetapkan untuk dibuat pertanggungjawaban. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI adalah dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3.2
 Capaian Kinerja Semester II (Juli s.d Desember 2023)
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan	
1.	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah (Perangkat KTP Elektronik)	Sudah	Sudah	Lampiran Laporan BMN	
2.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	3 (tiga) Mitra	14 (mitra)	Disertai Lampiran PKS Mitra	
3.	Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Ada/Tidak Ada	Ada		
4.	Pelayanan Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan			
	a.	Kecepatan Layanan (Hari)	1 Hari	1 hari	
	b.	Jenis Inovasi	Online	SI DUDU SI DOI	
			Offline	ANAK ITAH JELATA YUK KAWIN DUKCAPIL SAKULA PERSAMI NASI UDUK SI DUDU PRITA LAURA	
				MESIN ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI (ADM)	
				JEMPUT BOLA DUKCAPIL MAJA MASYARAKAT (DMM)	
				JEMPUT BOLA PADA EVENT-EVENT	
				NAKAR ANTAH (NAMPA KARTU IDENTITAS ANAK ITAH)	
	c.	Jumlah Inovasi	14	14	
	5.	Terlaksananya Penerapan Zona Integritas (ZI)	Sudah	Sudah	Disertai Lampiran berupa SK dan Dokumen pendukung lainnya

Berdasarkan Tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya bahwa untuk semester II tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk tahun 2023 sudah melaporkan Barang Milik Negara (BMN) termasuk perangkat KTP Elektronik).

Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data khususnya terkait Kartu Identitas Anak terealisasi sebanyak 14 mitra dari target sebanyak 3 mitra di tahun 2023, demikian juga dengan penyajian data kependudukan telah dilakukan merupakan data konsolidasi dan dibersihkan dari kementerian, laporan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali atau 2 semester setiap tahunnya.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan Kinerja serta capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3. 3
Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	IKM Dinas Kependudukan	B	B	B	B	B	A	A
2.	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	40%	50	50%	88%	99,43%	99,75%	100%
3.	Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya	40%	50%	55%	44%	100%	100%	100%
5.	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL	50%	60%	70%	92%	100%	99,44%	100%
6.	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga	60%	100%	100%	92%	100%	100%	100%
7.	Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Kompeten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Perbandingan realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan Kinerja serta capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4
Capaian kinerja sampai tahun 2023

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Tahun 2022			Tahun 2023			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Tingkat Capaian
IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	A	B	92,91%	A	A	100 %	Sangat Tinggi
Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	40%	80%	99,43%	123%	100%	99,75%	99,75%	Sangat Tinggi
Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	40%	85%	100%	117%	100%	100%	100 %	Sangat Tinggi
Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL	50%	90%	100%	111%	100%	99,44%	99,44%	Sangat Tinggi
Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Kompeten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	Sangat Tinggi

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian kinerja sampai tahun 2023 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

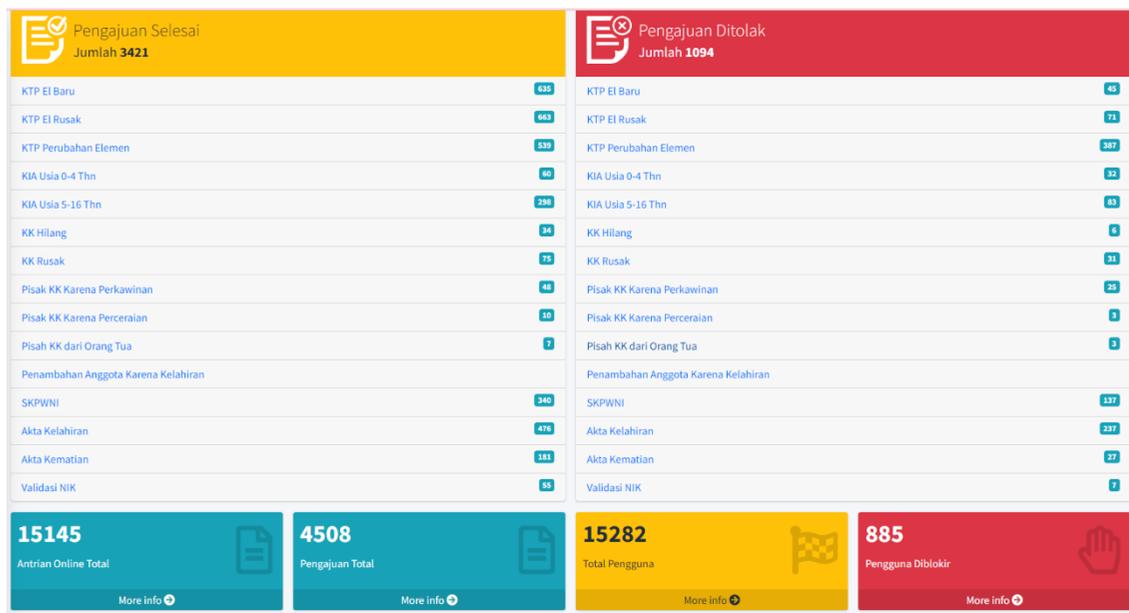
Tabel 3.3
Capaian kinerja sampai tahun 2023

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Tahun 2022			Target Nasional	Tahun 2023			
		Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian	Tingkat Capaian
IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	A/88,31	B/82,05	92,91%	A	A/88,31	A/89,68	100%	Baik
Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	40%	80%	99,43%	123%	97%	100%	99,75%	99,75%	Sangat Tinggi

Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	40%	85%	100%	117%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL	50%	90%	100%	111%	99,40	100 %	99,44%	99,44%	99,44%	Sangat Tinggi
Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Kompeten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tahun 2023 Mutu Pelayanan ditargetkan A dengan rentang indeks 88,31-100. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya melakukan Survei IKM tahun 2023 terhadap 12 jenis layanan didapat bahwa IKM dengan indeks sebesar 89,68 atau kategori (A). Keadaan ini sudah mencapai target yang diharapkan.



Pada tahun 2023, pelayanan yang telah dilakukan dalam rangka mempermudah akses masyarakat dalam mengurus Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah mengadopsi penggunaan Teknologi Informasi berbasis *web based (Aplikasi SI-DOI)* yang dapat diakses menggunakan Gadget HP/laptop/Komputer dan lain sebagainya yang kompatibel. Masyarakat Kota Palangka Raya dimudahkan, karena dapat mengakses layanan Adminduk dari mana saja tanpa harus datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

Aplikasi Si Doi mendapat sambutan positif dari masyarakat, pelayanan Online berbasis *web based (SI-DOI)* ini sangat berdampak signifikan pada peningkatan kinerja layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya secara keseluruhan tahun 2023.

Aplikasi SI-DOI ini dapat diakses melalui website <https://sidoidisdukcapil.palangkaraya.go.id/> yang mencakup 23 Layanan Online termasuk antrean online, kecuali perekaman data KTP elektronik yang mewajibkan pemohon untuk datang langsung melakukan perekaman.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Efisiensi dalam Penguatan Tata Kelola

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya melalui Pemerintah Kota Palangka Raya senantiasa melakukan penguatan tata Kelola sehingga semakin efektif dan efisien dalam bentuk organisasi yang semakin ramping, simpel dan melayani masyarakat dengan inovasi pelayanan publik yang baik. Bentuk efisiensi penggunaan sumberdaya

organisasi dalam penguatan tata Kelola yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah:

- **Penyederhanaan Birokrasi**

Dalam rangka memindaklanjuti perkembangan kebijakan nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah melaksanakan implementasi delayering yang mengalihkan Eselon IV sebagai Kepala Seksi menjadi Jabatan Fungsional yang dimuat dalam Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/428/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Uraian Tugas Kelompok Sub-Subtansi dan Tugas Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Implementasi ini mengalihkan Eselon IV atau Inpassing Jabatan Fungsional adalah :

- Kepala Seksi (Eselon IV) sebanyak 9
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebanyak 1 Perencana Ahli Muda

b. **Efisiensi Kinerja Anggaran atas Rencana Kerja**

Perencanaan dan penganggaran Tahun 2023 diupayakan dengan penyempurnaan penganggaran berbasis kinerja untuk mewujudkan penerapan konsep money follow program. Efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun 2023 adalah:

1. Belanja Birokrasi seperti Belanja Honorarium, perjalanan dinas, pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan dinas, dan sisa satuan harga penganggaran dibandingkan harga satuan riil.
2. Alokasi Gaji Pegawai dan tunjangan kinerja tambahan Efisiensi anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dapat dilakukan dalam analisis Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Efisiensi untuk satuan kerja dihitung dengan menggunakan perumusan sebagai berikut:

1. Capaian RO

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : capaian RO tingkat satuan kerja

RVRO_i : realisasi volume RO i

TVRO_i : target volume RO i

m : jumlah RO

RO	VOLUME		RVRO/TVRO	Capaian RO
	Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	A/86,98	A/86,98	100 %	100 %

2. Penyerapan Anggaran

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : penyerapan anggaran

RA : realisasi anggaran

AA : alokasi anggaran

AA	RA	P
9.769.775.905	8.971.332.254	91,83%

3. Efisiensi

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AARO_i : alokasi anggaran RO i

RARO_i : realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

RO	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AAROx CRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)x(3)	(6)=(5)-(4)
A	91,83%	9.769.775.905	8.971.332.254	8.971.585.213	252.959,56
Efisiensi RO = $\frac{\sum((AARO \times CRO) - RARO)}{\sum(AARO)}$ (7) = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)}$					0,002%

Rumusan dalam transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai antar 0%-100% dalam mendapatkan nilai kinerja.

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Nilai Efisiensi RO adalah Sebagai berikut :

$$NE = 50\% + (0,002\% / 20 * 50) = 50,00005\%$$

4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

RAK_n : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n

RPDK_n : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n

n : jumlah bulan

Bulan	RAK _n	RPDK _n	Tingkat Konsistensi per Bulan	Konsistensi pada bulan...
Januari	180.199.999	1.817.338.560	9,92 %	9 %
Februari	668.814.796	2.819.500.609	23,72 %	23 %
Maret	1.361.682.530	3.593.897.183	37,89 %	37 %
April	2.191.928.025	4.520.662.703	48,49 %	48 %
Mei	2.992.833.311	5.429.042.107	55,13 %	55 %
Juni	4.271.493.988	6.274.157.534	68,08 %	68 %
Juli	5.158.762.530	6.916.911.739	74,58 %	74 %
Agustus	5.629.182.742	7.502.229.494	75,03 %	75 %
September	6.135.509.837	8.053.301.089	76,19 %	76 %
Oktober	6.681.389.629	9.311.273.633	71,76 %	71 %
November	7.381.436.737	9.647.075.467	76,51 %	76 %
Desember	8.971.332.254	9.769.775.905	91,83 %	91 %

c. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (COP \times W_{COP} \text{ atau } CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan:

NKI : nilai Kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP: capaian *Output Program*

CRO: capaian RO

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

W_P : bobot penyerapan anggaran

W_K : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

W_{COP}: bobot capaian *Output Program*

W_{CRO} : bobot capaian RO

W_E : bobot efisiensi

Bobot masing-masing variabel aspek implementasi sebagai berikut:

$$W_P = 9,7\%$$

$$W_K = 18,2\%$$

$$W_{COP} = W_{CRO} = 43,5\%$$

$$W_E = 28,6\%$$

$$\begin{aligned} NKI &= (P \times W_P) + (K \times W_K) + (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E) \\ &= (91,8\% \times 9,7\%) + (91\% \times 18,2\%) + (91,83\% \times 43,5\%) + (50,00\% \times 28,6\%) \\ &= (0,089) + (0,165) + (0,399) + (0,29) = 94,4\% \end{aligned}$$

Nilai kinerja atas aspek implementasi adalah sebesar 94,4% (Delapan puluh satu koma dua satu persen) atau berkinerja SANGAT BAIK. (Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 Pasal 38).

7. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Guna menunjang keberhasilan atas pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang sudah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah menetapkan Program/ Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. 4
Program/ Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pelayanan Kependudukan	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	A 99,75 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian	100%		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	85 %	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL	99,40%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga	100%		
Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata	100%		
Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Kompeten	100%		
Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Valid	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk
					Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
				Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Laporan Peristiwa Penting
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
					Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota
					penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

Adapun pencapaian dari program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang menunjang Indikator Kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Realisasi Cetak KTP-el 2023

Tabel 3.5
Realisasi Cetak KTP-el 2023

NO.	KECAMATAN	KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK		
		WAJIB KTPel	REKAMAN	PERSENTASE (%)
1.	PAHANDUT	68.974	68.481	99.29
2.	BUKIT BATU	9.988	9.902	99.14
3.	JEKAN RAYA	109.803	109.281	99.52
4.	SABANGAU	17.425	17.295	99.25
5.	RAKUMPIT	2.643	2.611	98.79
JUMLAH		208,833	207,570	99.40

Sampai dengan tahun 2023 telah melakukan perekaman data KTP-el dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebanyak 207.570 atau sebesar 99.40 persen.

b. Pencatatan Sipil

Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah mencetak Akta-akta pada Pencatatan Sipil sebanyak 94.884 terdiri dari :

Tabel 3.6
Pencetakan Akta

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Akta Perceraian	64
2.	Akta Perkawinan	559
3.	Akta Kematian	2.117
4.	Akta Kelahiran	92.144
JUMLAH		94.884

8. Penghargaan Yang Didapat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya selama Tahun 2023 berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan public di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya mendapatkan indeks 3,12 (B-) dari sebelumnya kategori C- di

tahun 2022. (sumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia).

B. REALISASI ANGGARAN

Gambaran realisasi keuangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya mendapatkan alokasi dana dari APBD-P sebesar **Rp.9.769.775.905,00**.

Realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah Rp. **8.971.332.254,00** atau sebesar 91,83%, hal ini menunjukkan pencapaian telah mencapai nilai di atas 90% yang menunjukkan pencapaian sangat baik karena telah terserap lebih dari sembilan puluh persen total pagu anggaran tahun 2023.

Adapun ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagai berikut :

Tabel 3.7
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) T.A. 2023
PEMERINTAHAN KOTA PALANGKARAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	9.769.775.905	8.971.332.254,00	91,83	9.100.585.474,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.577.096.845	7.795.104.254,00	90,88	7.965.789.619,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.873.990.663	4.191.203.855,00	85,99	4.276.647.802,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.018.226.322	2.512.449.220,00	83,24	2.563.697.233,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.153.307.442	1.885.252.800,00	87,55	1.911.173.409,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.113.707.442	1.849.654.800,00	87,51	1.911.173.409,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	39.600.000	35.598.000,00	89,89	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	216.337.208	157.723.408,00	72,91	165.270.833,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	209.137.208	154.163.608,00	73,71	165.270.833,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.200.000	3.559.800,00	49,44	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	254.280.000	168.015.000,00	66,07	177.910.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	252.000.000	168.015.000,00	66,67	177.910.000,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	2.280.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	58.880.000	51.055.000,00	86,71	49.380.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	56.000.000	48.835.000,00	87,21	49.380.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.880.000	2.220.000,00	77,08	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	146.443.200	100.591.380,00	68,69	106.022.880,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	141.943.200	98.853.300,00	69,64	106.022.880,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.500.000	1.738.080,00	38,62	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.850.000	3.427.680,00	43,66	2.985.349,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.700.000	3.427.680,00	44,52	2.985.349,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	150.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	68.472	21.274,00	31,07	23.680,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.472	20.746,00	53,92	23.680,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	30.000	528,00	1,76	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	162.790.000	130.874.145,00	80,39	135.303.013,00

5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	160.000.000	129.219.033,00	80,76	135.303.013,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.790.000	1.655.112,00	59,32	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.650.000	3.872.127,00	83,27	3.907.004,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.500.000	3.786.687,00	84,15	3.907.004,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	150.000	85.440,00	56,96	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.620.000	11.616.406,00	85,29	11.721.065,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.200.000	11.360.098,00	86,06	11.721.065,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	420.000	256.308,00	61,03	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.679.484.341	1.503.155.710,00	89,50	1.525.750.569,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.679.484.341	1.503.155.710,00	89,50	1.525.750.569,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.679.484.341	1.503.155.710,00	89,50	1.525.750.569,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	176.280.000	175.598.925,00	99,61	187.200.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	176.280.000	175.598.925,00	99,61	187.200.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	168.120.000	168.118.925,00	100,00	179.040.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	7.480.000,00	91,67	8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.703.106.182	3.603.900.399,00	97,32	3.689.141.817,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.383.011.300	1.347.041.075,00	97,40	1.286.555.536,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.383.011.300	1.347.041.075,00	97,40	1.286.555.536,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	23.647.000	23.647.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	61.003.200	60.549.650,00	99,26	59.112.650,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.259.378	1.980.000,00	87,63	12.300.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	25.441.800	25.390.000,00	99,80	17.125.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	92.367.222	89.038.500,00	96,40	103.745.186,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.863.700	116.735.500,00	96,58	95.782.261,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	262.186.100	255.673.725,00	97,52	819.162.314,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.500.000	3.260.000,00	93,14	8.250.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	535.261.200	531.659.500,00	99,33	75.437.250,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0	0,00	0,00	16.388.875,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.425.500	7.281.500,00	50,48	13.272.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	22.035.000	21.975.000,00	99,73	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	44.704.700	41.342.200,00	92,48	0,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.640.000	3.250.000,00	89,29	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0	0,00	0,00	2.325.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.855.000	40.123.500,00	95,86	49.760.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.984.000	7.190.000,00	65,46	7.150.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.625.000	16.625.000,00	100,00	6.745.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	63.750.000	63.325.000,00	99,33	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	38.462.500	37.995.000,00	98,78	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.514.699.657	1.472.970.405,00	97,25	1.478.747.720,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.381.473.885	1.351.197.198,00	97,81	1.355.699.561,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000	2.700.000,00	100,00	4.900.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.750.000	18.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	950.820.000	943.514.280,00	99,23	1.011.410.740,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	101.271.000	101.253.175,00	99,98	42.780.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	34.782.000	34.127.500,00	98,12	28.424.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	20.000.000	20.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	18.260.000	18.250.000,00	99,95	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	25.000.000	22.925.000,00	91,70	55.659.500,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	35.000.000	32.108.480,00	91,74	29.773.845,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	157.740.885	144.199.863,00	91,42	130.480.376,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.950.000	9.360.000,00	85,48	10.600.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.200.000	4.008.900,00	64,66	1.671.100,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Astransi	79.125.772	73.833.207,00	93,31	67.343.159,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	70.000.000	65.051.295,00	92,93	59.894.103,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.125.772	8.781.912,00	96,23	7.449.056,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.500.000	1.500.000,00	100,00	705.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.500.000	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	0	0,00	0,00	705.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000	17.500.000,00	87,50	28.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000	17.500.000,00	87,50	0,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00	28.500.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.600.000	2.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	2.600.000	2.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000	26.340.000,00	87,80	26.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	23.180.000	19.520.000,00	84,21	26.500.000,00

5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	6.820.000	6.820.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	149.695.500	134.305.000,00	89,72	142.357.442,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.695.500	74.405.000,00	82,95	116.737.317,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.687.500	3.475.000,00	74,13	23.336.650,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.298.000	1.540.000,00	18,56	2.991.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.420.000	12.580.000,00	93,74	15.860.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0	0,00	0,00	4.294.667,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	34.310.000	33.620.000,00	97,99	33.735.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.760.000	2.760.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	26.220.000	20.430.000,00	77,92	35.320.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000	19.900.000,00	99,50	25.620.125,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000	19.900.000,00	99,50	25.620.125,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	40.000.000	40.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.06.0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	40.000.000	40.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	655.699.725	649.583.919,00	99,07	781.481.119,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	655.699.725	649.583.919,00	99,07	781.481.119,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	502.999.725	500.403.919,00	99,48	583.411.119,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	152.700.000	149.180.000,00	97,69	198.070.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	8.577.096.845	7.795.104.254,00	90,88	7.965.789.619,00
5.2	BELANJA MODAL	1.192.679.060	1.176.228.000,00	98,62	1.134.795.855,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	848.331.950	834.334.500,00	98,35	863.394.155,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	294.302.450	291.634.500,00	99,09	108.171.248,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	133.020.250	133.010.500,00	99,99	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	16.000.000	16.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	117.020.250	117.010.500,00	99,99	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	161.282.200	158.624.000,00	98,35	108.171.248,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	59.200.000	57.350.000,00	96,88	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	36.250.000	36.000.000,00	99,31	84.171.250,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	65.832.200	65.274.000,00	99,15	23.999.998,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.000.000	5.800.000,00	96,67	24.349.908,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	0,00	24.349.908,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0	0,00	0,00	9.999.999,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0	0,00	0,00	14.349.909,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.000.000	5.800.000,00	96,67	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	6.000.000	5.800.000,00	96,67	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	548.029.500	536.900.000,00	97,97	730.872.999,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	190.248.800	184.000.000,00	96,72	720.822.999,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	144.248.800	139.500.000,00	96,71	645.872.999,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	46.000.000	44.500.000,00	96,74	74.950.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	357.780.700	352.900.000,00	98,64	10.050.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	52.780.700	50.900.000,00	96,44	10.050.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	305.000.000	302.000.000,00	99,02	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	344.347.110	341.893.500,00	99,29	271.401.700,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	310.800.000	309.893.500,00	99,71	271.401.700,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	310.800.000	309.893.500,00	99,71	271.401.700,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	260.000.000	259.173.500,00	99,68	251.481.700,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	20.000.000	19.920.000,00	99,60	19.920.000,00
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	30.800.000	30.800.000,00	100,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	33.547.110	32.000.000,00	95,39	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	33.547.110	32.000.000,00	95,39	0,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	33.547.110	32.000.000,00	95,39	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.192.679.060	1.176.228.000,00	98,62	1.134.795.855,00
	JUMLAH BELANJA	9.769.775.905	8.971.332.254,00	91,83	9.100.585.474,00
	SURPLUS/DEFISIT	(9.769.775.905)	(8.971.332.254,00)	91,83	(9.100.585.474,00)

Sumber Data : SIPD Dicitak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

Realisasi anggaran dalam masing-masing program/ kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.8
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD KOTA PALANGKA RAYA
SERTA HASIL RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023

OPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kondisi sampai dengan 31 Desember 2023

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5		7		12		13=12/7x100%	
Semua Bidang									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00		100		-		0,00%	
	Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti (Temuan)	0,00	5.679.219.946	0	8.913.500.742	-	8.138.693.950	0,00%	91,31%
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	0,00		0		-		0,00%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dicetak (Dokumen)	0,00	155.581.750	8	149.828.350	8	149.280.825	100,00%	99,63%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	35.680.000	2	45.290.000	2	45.250.800	100,00%	99,91%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	79.901.750	1	8.600.000	1	8.580.600	100,00%	99,77%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	1	11.000.000	1	10.875.585	100,00%	98,87%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	1	8.100.000	1	8.080.200	100,00%	99,76%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	1	10.000.000	1	9.868.100	100,00%	98,68%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	40.000.000	12	43.227.228	12	43.089.540	100,00%	99,68%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	2	23.611.122	2	23.536.000	100,00%	99,68%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	4.765.149.923	7	5.038.186.947	7	4.354.152.355	100,00%	86,42%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	4.590.857.639	39	4.697.710.663	39	4.015.604.930	100,00%	85,48%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	155.172.284	12	279.371.034	12	277.959.125	100,00%	99,49%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	19.120.000	12	61.105.250	12	60.588.300	100,00%	99,15%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pegawai yang Terpenuhi (Orang)	0,00	83.750.000	90	132.212.500	90	127.660.000	100,00%	96,56%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	53.750.000	90	102.212.500	90	101.320.000	100,00%	99,13%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	30.000.000	6	30.000.000	6	26.340.000	100,00%	87,80%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rutin Kantor yang Terpenuhi (Bulan)	0,00	208.573.088	12	1.541.349.500	12	1.510.151.115	100,00%	97,98%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	1	14.425.500	1	7.281.500	100,00%	50,48%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	13.835.000	12	1.205.699.000	12	1.190.022.500	100,00%	98,70%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	5.624.688	2	98.875.000	2	98.871.140	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	28.995.400	12	30.950.000	12	27.285.000	100,00%	88,16%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	6.250.000	12	31.400.000	12	27.447.500	100,00%	87,41%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	153.868.000	12	160.000.000	12	159.243.475	100,00%	99,53%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Paket)	0,00	-	4	205.047.110	4	201.464.000	100,00%	98,25%
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	2	59.200.000	2	57.350.000	100,00%	96,88%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	1	145.847.110	1	144.114.000	100,00%	98,81%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	0,00	235.017.885	12	1.408.795.835	12	1.376.751.605	100,00%	97,73%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	221.199.760	12	192.740.885	12	176.308.343	100,00%	91,47%

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	4	17.278.178	4	16.171.700	100,00%	93,60%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	13.818.125	12	1.198.776.772	12	1.184.271.562	100,00%	98,79%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	0,00	231.147.300	12	438.080.500	12	419.234.050	100,00%	95,70%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	77.598.300	14	78.991.700	14	68.373.550	100,00%	86,56%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	32.132.250	2	25.441.800	2	25.390.000	100,00%	99,80%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	28.440.000	12	45.000.000	12	37.830.000	100,00%	84,07%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	68.146.750	1	190.000.000	1	189.273.500	100,00%	99,62%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	24.830.000	2	98.647.000	2	98.367.000	100,00%	99,72%
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	91,31%
							Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (%)	100,00		100		-		0,00%	
	Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata (%)	100,00	320.000.000	100	295.242.200	-	288.258.178	0,00%	97,63%
	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL (%)	100,00		100		-		0,00%	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Layanan)	0,00	170.000.000	20	224.077.800	20	219.740.178	100,00%	98,06%
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	*Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	0,00	-	500	93.985.900	500	92.657.378	100,00%	98,59%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	0,00	150.000.000	500	110.091.900	500	107.354.300	100,00%	97,51%
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	0,00	20.000.000	120	20.000.000	120	19.728.500	100,00%	98,64%
Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	0,00	150.000.000	21	31.604.400	21	31.463.100	100,00%	99,55%

Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	*Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	0,00	150.000.000	1	31.604.400	1	31.463.100	100,00%	99,55%
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			-		39.560.000		37.054.900		93,67%
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0,00	-	12	39.560.000	12	37.054.900	100,00%	93,67%
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	97,63%
							Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting (%)	100,00		100		-		0,00%	
	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun (%)	100,00	38.119.688	100	125.000.100	-	123.359.663	0,00%	98,69%
	Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian (%)	100,00		100		-		0,00%	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil (Layanan)	0,00	38.119.688	28	125.000.100	28	123.359.663	100,00%	98,69%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	0,00	38.119.688	500	60.000.000	500	58.575.517	100,00%	97,63%
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	0,00	-	28	65.000.100	28	64.784.146	100,00%	99,67%
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	98,69%
							Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder (%)	100,00		100		-		0,00%	
	Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik (%)	100,00	1.178.084.313	100	271.897.213	-	259.063.869	0,00%	95,28%
	Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai (%)	100,00		100		-		0,00%	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (Dokumen)	0,00	1.123.184.000	2	135.000.000	2	134.100.769	100,00%	99,33%
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	0,00	1.073.184.000	2	100.000.000	2	99.912.769	100,00%	99,91%
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0,00	50.000.000	6	35.000.000	6	34.188.000	100,00%	97,68%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dokumen)	0,00	54.900.313	12	136.897.213	12	124.963.100	100,00%	91,28%
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0,00	4.918.750	12	93.415.650	12	89.085.000	100,00%	95,36%

Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	*Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	0,00	49.981.563	12	43.481.563	12	35.878.100	100,00%	82,51%
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	95,28%
							Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Memadai (%)	100,00	138.135.875	100	164.135.650	-	161.956.594	0,00%	98,67%
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun (Dokumen)	0,00	138.135.875	2	164.135.650	2	161.956.594	100,00%	98,67%
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	64.345.625	2	52.993.775	2	52.916.594	100,00%	99,85%
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	*Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain (Dokumen)	0,00	73.790.250	1	111.141.875	1	109.040.000	100,00%	98,11%
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	98,67%
							Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
					9.769.775.905		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	100,00%	91,83%
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber Data : Laporan E-mOnev Dukcapil Kota Palangka Raya Tahun 2023 pada website <https://bappedakotapalangkaraya.emonev7.com/>



BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Dukcapil Kota Palangka Raya saat ini melayani 24 Jenis Pelayanan Dukumen Administrasi Kependudukan meliputi, Kartu Keluarga (KK), kartu Tanda Penduduk Elektronik (ktp-el), Kartu Identitas Anak (KIA) Surat Keterangan Pindah bagi warga yang akan keluar daerah, Surat Keterangan Pindah Datang WNI (SKPWNI), Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawina, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan, Surat Keterangan Pencatatan Sipil, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perpres tersebut merupakan upaya reformasi sistem pelayanan Adminduk di Indonesia agar lebih cepat. Ia mengatur tentang pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dukcapil Kota Palangka Raya kecepatan dalam pelayanan publik mencakup jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan publik sesuai dengan Standar Oprasional yang berlaku memastikan bahwa kepengurusan dalam hitungan menit. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Palangka Raya memastikan bahwa proses pengurusan dokumen kependudukan, seperti pembuatan kartu identitas atau akta kelahiran, dan lain-lain dilakukan dengan cepat dan efisien. Kecepatan ini sangat penting karena dapat memengaruhi pengalaman masyarakat dalam menggunakan layanan publik. Dalam melakukan kepengurusan masyarakat juga dimudahkan mencakup persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh penerima layanan publik.

Dukcapil Kota Palangka Raya memastikan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga dalam pengurusan dokumen kependudukan tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Dengan alur yang sederhana dan transparan, dan semakin mudah diakses masyarakat, termasuk formulir dapat diakses dan didownload baik di website Dinas maupun di website pelayanan online SIDOI, dan Dukcapil Kota Palangka Raya memastikan bahwa semua pelayanan tidak dikenakan tarif layanan atau secara gratis.

Kompetensi pegawai, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya menempatkan pegawai yang terlatih dan kompeten dalam mengelola data kependudukan dan pelayanan Administrasi Kependudukan. Secara reguler

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan melakukan pelatihan sehingga membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Salah satu program unggulan setiap pekan hari Jumat, Ditjen Dukcapil rutin mengadakan acara *Dukcapil Belajar* yang dapat diakses oleh seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seluruh Indonesia. Program ini merupakan wadah untuk meningkatkan wawasan bagi SDM di Dukcapil demi peningkatan layanan.

Dalam hal keterbukaan dan transparansi informasi, Dukcapil memiliki akses terhadap data kependudukan yang sangat sensitif dan rahasia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keterbukaan dan transparansi informasi bagi masyarakat, sambil tetap menjaga kerahasiaan data pribadi. Bahwa, sangat penting untuk membangun sistem yang aman dan dapat diandalkan dalam penyimpanan, pengolahan, dan akses data kependudukan. Dukcapil sudah membuka link keterbukaan informasi publik melalui Kotak Pengaduan, Whatsapp pengaduan, Website LAPOR serta pengaduan melalui website Dinas dan testimoni dan survei Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi pelayanan online SIDOI. Dukcapil Kota Palangka Raya juga terus menggalakan dalam hal penanggulangan Praktik Korupsi:

Dukcapil juga dapat menghadapi risiko terkait praktik korupsi, seperti pungutan liar, pemalsuan data, atau penyalahgunaan wewenang. Penting untuk memperkuat integritas internal dan mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah dan menindak praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk maklumat layanan, sosialisasi dan edukasi, arahan kepada seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya serta memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan.

Dukcapil Kota Palangka Raya memastikan partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan data kependudukan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi sipil. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan serta memiliki mekanisme untuk menyampaikan masukan, keluhan, atau saran terkait pelayanan dan kebijakan yang berkaitan dengan Dukcapil. Selain itu masyarakat juga pro aktif dan bertanggungjawab dalam mengelola data pribadi mereka masing-masing dengan hadirnya Identitas Kependudukan Digital.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah bertransformasi secara digital dengan menerbitkan IKD berkelanjutan, sehingga dapat menggantikan KTP-elektronik secara bertahap. Implementasi pada tahap pertama adalah pegawai Dukcapil. Tahap kedua menyasar ASN di lingkup Kota Palangka Raya. Pelajar atau mahasiswa menjadi target implementasi tahap ketiga. Tahap terakhir yaitu masyarakat umum lainnya sesuai Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 470/71/DKPS/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pemberlakuan Identitas Kependudukan Digital.

Dukcapil memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat terkait Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil. Tantangan yang dihadapi meliputi peningkatan aksesibilitas, penyederhanaan prosedur, kecepatan pelayanan, dan respon yang cepat terhadap kebutuhan dan permintaan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima Kepada Masyarakat Dukcapil Kota Palangka Raya hadir dalam bentuk pelayanan digital dengan mengadopsi pemanfaatan Teknologi Informasi berupa pelayanan berbasis webased SI DOI, serta tetap melakukan inovasi pelayanan dalam bentuk konvensional Jemput Bola langsung hadir ditengah masyarakat serta melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait.

Beberapa hal tersebut adalah upaya konkret yang dilakukan dalam mengatasi tantangan dan merupakan langkah penting dalam membangun Zona Integritas yang efektif dan berkelanjutan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Dalam penguatan integritas, kinerja, dan layanan, terdapat beberapa inovasi unggulan yang sudah diterapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sudah mengadopsi penggunaan Teknologi Informasi dalam melayani masyarakat. Penggunaan dan Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut menjadi inovasi yang signifikan dalam memperkuat integritas, kinerja, dan layanan.

Inovasi SIDOI memperkuat inovasi unggulan yang sudah ada berupa Inovasi kegiatan *Dukcapil Maja Masyarakat (DMM)* atau dikenal dengan Jemput Bola merupakan kegiatan rutin dan dijadwalkan kembali untuk menjangkau masyarakat terutama pinggiran Kota Palangka Raya yang masih keterbatasan jarak, sarana dan prasarana serta transportasi, terlebih keterbatasan sarana prasarana teknologi informasi khususnya akses internet. Inovasi ANAK ITAH, layanan Akte Kelahiran, perubahan Kartu Keluarga implementasinya bekerjasama dengan Rumah Sakit yang ada di Kota Palangka Raya , JELATAH, yaitu Jemput Bola Akta Kematian kerjasama dengan Kelompok Pengelola dan Pengurus Makam, Paguyuban, Kelurahan, RT dan RW. Dukcapil Sakula, yaitu Layanan KTP Elektronik ke sekolah-sekolah. Inovasi Nasi Uduk, yaitu layanan informasi layanan terpadu Whatsapp center. SIDUDU yakni sitem informasi Kependudukan Terpadu kerjasama dengan Pengadilan Agama.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2023 dibuat. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih jauh dari sempurna. Karena guna penyempurnaan pada penyusunan berikut, kami sangat berharap masukan yang berarti agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palangka Raya, Januari 2024



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA**

SABIRIN MUHTAR, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690308 199003 1 007